



Aneh,

## Direksi PD Pasar Pasang Gaji dan Tunjangan Sendiri

SINGARAJA, NusaBali

Kenaikan gaji dan pemberian tunjangan bagi jajaran direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar di Buleleng, mendulang sorotan tajam. Anggota DPRD Buleleng cenderung akan memangkas mekanisme kenaikan gaji dan tunjangan tersebut karena terksan aneh.

Hal tersebut terungkap dalam rapat gabungan komisi dengan Pantia Khusus (Pansus) DPRD Buleleng dengan agenda Ranperda Penyertaan Modal PD Pasar, Senin (7/12) siang.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Sumerdahana. Dalam ranperda, PD Pasar akan mendapat suntikan modal Rp1,3 miliar kurun waktu 4 tahun. Saat ini PD Pasar mengelola modal Rp100 juta. Selain masalah tambahan modal, poin yang dianggap bermasalah kedepannya men-

yangkut kenaikan gaji dan pemberian tunjangan bagi direksi PD Pasar.

Ketua Pansus I Gede Suradnya menjelaskan, kenaikan gaji dan pemberian tunjangan bagi direksi PD Pasar ditentukan sendiri oleh jajaran Direksi PD Pasar. Ketentuan itu aneh dan kurang etis karena dikawatirkan pihak Direksi leluasa menaikkan gaji dan pemberian tunjangan.

Anggota Komisi I Wayan Teren mengusulkan agar redaksional klausul pasal tersebut disempurnakan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari. "Jangan sampai muncul kesan, menejemen perusahaan seenaknya mengatur masalah gaji maupun tunjangan. Saya kira sangat tidak etis," katanya.

Politisi Partai Hanura asal Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada ini juga menilai,

tambahan modal kerja dalam kurun waktu empat tahun terlalu fantastis. Teren minta agar eksekutif menyampaikan dasar pertimbangannya. "Sebaiknya eksekutif menjelaskan dasar pemikiran kenaikan modal kerja tersebut," jelasnya.

Senada diungkapkan Luh Hesti Ranitasari. Politisi Partai Demokrat asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan ini menyebut, tidak tepat kalau direksi diberikan kebebasan mengatur kenaikan gaji dan pemberian tunjangan, karena dana yang dikelola bersumber dari APBD. "Setidaknya, direksi hanya mengusulkan kepada Bupati sebagai pemilik perusahaan dan atas persetujuan Badan Pengawas," katanya.

Dihubungi terpisah Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Buleleng Putu Gede Satwikayadnya mengatakan, penyusunan

klausul pasal yang mengatur tentang gaji dan tunjangan direksi itu sejatinya sudah sesuai hasil kajian dari Bagian Hukum Pemkab Buleleng. Dimana direksi memutuskan kenaikan gaji dan tunjangan setelah mendapat persetujuan badan pengawas. "Kami sudah sempat membahas masalah itu. Intinya kenaikan gaji maupun tunjangan tidak sepenuhnya ada pada kami (direksi,red)," jelasnya.

Di sisi lain Satwikayadnya mengatakan, penyertaan modal termasuk kenaikan modal kerja itu untuk mendukung rencana pemerintah merevitalisasi Pasar Seririt, Pasar Banjar, dan terbaru Pasar Banyuasri menjadi pasar semi modern. Alokasi dana penyertaan modal dalam bentuk aset bangunan dan modal kerja ini akan dipayungi perda, sedang pembahasan. **k19**

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 4



## Batal Dapat Insentif, Pejabat Dijatah Mobil Baru

MANGUPURA, NusaBali

Meski batal mendapatkan tambahan penghasilan atau insentif, kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Badung akan mendapatkan fasilitas mobil dinas baru di 2016. Tahun depan, Pemkab menggelontorkan anggaran Rp 24,37 miliar untuk pengadaan mobil baru. Pengadaannya tersebar di sejumlah SKPD, Bagian Perlengkapan dan Aset Pemkab, termasuk di lingkungan sekretariat dewan (setwan).

Berdasarkan penelusuran, setwan mendapat jatah paling banyak. Karena akan

digunakan oleh para anggota dewan serta pimpinan. Sedikitnya Rp 24,37 miliar lebih dana dari APBD Badung dikuras untuk pengadaan mobil dinas ini.

Namun jenis mobil baru apa yang akan dibeli masih simpang siur. Disebut-sebut jenis mobil dinas baru yang akan dibeli adalah Toyota Innova.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Badung I Made Wira Darmajaya yang dikonfirmasi, Senin (7/12), membenarkan pengadaan mobil dinas baru tersebut. Ia menjelaskan pengadaan mobil dinas

baru sejumlah 37 unit, untuk operasional sekretariat.

Pejabat asal Sembung, Mengwi, itu pun tidak memungkiri mobil-mobil jenis Toyota Innova yang akan digunakan oleh anggota dewan. "Pengadaan mobil untuk operasional sekretariat dewan, yang kemudian digunakan oleh anggota dewan," tuturnya.

Untuk diketahui, saat ini seluruh anggota dewan telah mendapatkan jatah mobil dinas, yang kondisinya masih sangat layak. Sedangkan pimpinan dewan (ketua, wakil ketua) mendapatkan

jatah mobil Toyota Fortuner dan sedan Toyota Camry.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, yang melakukan pengadaan mobil dinas baru di antaranya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker), Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes (BPMD-PD), Kantor Arsip, Dinas Pariwisata Daerah (Disparda). **asa**

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 2



# Gubernur Segera Cabut Perwali Penghambat RS

★ RS Indera Sudah Dianggarkan

Rp 107 Miliar di APBD

Pastika upaya tambah ruang bedah di RS Indera dari 2 jadi 6 unit, karena selama ini sehari hanya bisa layani operasi 25 pasien katarak

DENPASAR, NusaBali Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Zonasi Denpasar Utara yang dipetakan per kecamatan, dipastikan segera akan dicabut oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Masalahnya, keberadaan Perwali ini menghambat proses pengembangan RS Mata Bali Mandara---selama

seharusnya tidak sampai terjadi, andaikan ada kesadaran dari Pemkot Denpasar untuk mencabutnya sendiri setelah diingatkan Gubernur.

Menurut Pastika, pihaknya sudah sempat mengutus jajaran Pemprov Bali untuk koordinasi dengan Pemkot Denpasar. Namun nyatanya, sampai saat ini be-

ini disebut RS Indera---yang hingga kini izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya belum kunjung keluar.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Pastika saat melakukan sidak pelayanan ke RS Mata Bali Mandara, Jalan Angsoka Denpasar, Senin (8/12). Pastika menyatakan, pencabutan Perwali 14/2014 tersebut

lum kunjung membuahkan hasil. Begitu pula warning yang disampaikan Gubernur saat kunjungan kerja ke Pemkot Denpasar, belum ditindaklanjuti sampai sekarang.

Itu sebabnya, Gubernur Pastika segera akan mencabut Perwali yang meng-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 1



Sambungan . . . .



Gubernur Pastika didampingi Kadiskes Ketut Suarjaya dialog dengan pasien katarak di RS Mata Bali Mandara, Senin (7/12).

**PENGEMBANGAN  
RS MATA BALI MANDARA**

- Diarahkan nanti bisa memiliki 6 unit ruangan operasi, sehingga pasien katarak yang mencapai 5.600 orang di Bali ke depan bisa tertangani
- Saat ini, baru ada 2 unit ruangan operasi, dengan kemampuan lakukan operasi hanya untuk 25 pasien per hari
- Untuk kurangi kemacetan, nantinya akan dibangun parkir basement

**SISI KEUNGGULAN  
RS MATA BALI MANDARA**

- Sudah memiliki akreditasi Tipe A
- Jadi RS Mata Rujukan Regional
- RS Mata Bali Mandara kini bahkan sandang predikat terbaik di wilayah Indonesia Timur, baik dari segi pelayanan maupun peralatannya
- Tempatnya sangat strategis, karena di sebelah okasi pengembangan sudah ada Puskesmas dan Laboratorium

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

## Gubernur Segera Cabut Perwali Penghambat RS

### SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

hambat pengembangan RS Mata Bali Mandara. Padahal, pengembangan RS Mata Bali Mandara tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan lebih baik daripada yang sudah ada saat ini.

"Saya sebenarnya tidak berharap terjadi seperti ini (cabut Perwali 14/2014), saya tidak senang model seperti itu. Tapi, kalau kita sudah kasitahu sebelumnya dan mereka (Pemkot Denpasar) mau mencabutnya, kan lebih bagus. Jangan nunggu beginilah, kan kerusakan tambah parah jadinya," tandas Pastika.

"Hidup itu harus berubah sebelum dipaksakan, sukarela namanya, jangan paksarela seperti itu. Sebelumnya, saya juga sudah mengutus jajaran saya. Sudah 2 bulan lebih saya perintahkan. Saya pikir sudah selesai, tapi setelah mau dibangun, saya baru tahu kalau IMB belum jadi. Wajar nggak saya marah..." lanjut mantan Kapolda Bali berpangkat Komjen Polisi (Purn) yang pernah dianugerahi predikat 'Asia Star 2003' versi Majalah *Time* ini.

Pastika miris, karena saat melakukan sidak ke lapangan, Senin kemarin, melihat langsung banyak pasien harus antri dengan duduk di lorong-lorong RS Mata Bali Mandara bersama penunggu pasien, sebelum mereka mendapat giliran periksa. Dari situ, Pastika memandang proses pengembangan RS Indera harus dikebut.

Dengan pengembangan ini, RS Indera diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Misalnya, ruang operasi yang saat ini hanya ada 2 unit dan cuma bisa melaksanakan 25 tindakan operasi per hari, ke

depannya bisa ditambah 6 unit lagi. Diharapkan pula, ke depan RS Indera ini melayani pasien katarak yang diperkirakan jumlahnya akan mencapai 5.600 orang.

"Bagi yang menghambat proses pengembangan RS Mata Bali Mandara ini, mungkin belum pernah melihat langsung kondisinya. Sekali-sekali, berhenti dulu bekerja, coba cek sendiri kondisinya ke sini (RS) antara pukul 11.00 hingga 12.00 Wita. Saudara-saudara lihat sendiri kan tadi. Ini baru jam segini kan belum panas, sudah banyak yang antri. Bagaimana nanti, ada bayi lagi," kata Pastika.

Setelah melihat kondisi yang ada saat sidak RS Mata Bali Mandara, Senin kemarin, Pastika langsung meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya, untuk mencari ruang lain yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang tunggu 'sementara' bagi pasien yang antri. Pastika pun setuju untuk memanfaatkan Ruang Rapat Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ruangnya cukup luas. Kebetulan, lokasinya berdekatan dengan RS Mata Bali Mandara.

Pada bagian lain, Pastika menjelaskan RS Mata Bali Mandara sudah memiliki akreditasi Tipe A dan sekaligus jadi RS Mata Rujukan Regional. RS ini bahkan sandang predikat terbaik di wilayah Indonesia Timur baik dari segi pelayanan maupun peralatannya yang lengkap dan canggih.

Menurut Pastika, hal tersebut menjadi nilai tambah bagi pengembangan RS Mata Bali Mandara. Selain itu, lokasi pengembangan RS Mata Bali Mandara juga dinilai sangat strategis, karena bersebelahan dengan areal pengembangan sudah terdapat Puskesmas dan Laboratorium.

Menjawab pertanyaan awak media soal keberadaan RS Mata Bali Mandara disebut sebagai penyebab kemacetan dan mayoritas pasien adalah peserta JKBM dari keluarga kurang mampu tapi membawa kendaraan mewah, menurut Pastika, tidak masuk akal. Faktanya, kebanyakan mobil yang parkir di depan RS Mata Bali Mandara---di sekitar GOR Ngurah Rai---merupakan milik umum yang memanfaatkan lahan tersebut. Namun, Pastika tidak menampik beberapa pasien mungkin saja memiliki kendaraan roda empat.

Untuk menghindari kesan penyebab macet, kata Pastika, dalam perencanaan pengembangan RS Indera sudah dilengkapi dengan sistem parkir basement, sehingga pengunjung RS memiliki lahan parkir khusus di bawah tanah.

Terkait penamaan RS tersebut yang berisi Bali Mandara dan dianggap jadi permasalahan, Pastika mengaku tak pernah memasalahkan nama apa pun yang mau diberikan. Pihaknya hanya ingin memberikan sebuah nama yang bisa menjadi kebanggaan dan terus diingat masyarakat (Bali Mandara = Bali yang Maju, Aman, Damai, Sejahtera).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, menyatakan RS Indra sudah dianggarkan sebesar Rp 107 miliar. Rinciannya, dianggarkan sebesar Rp 35 miliar melalui APBD Bali Induk 2015 dan sebesar Rp 68 miliar dari APBD Bali Induk 2016.

Karena sudah dianggarkan, menurut Sugawa Korry, harusnya pengembangan RS Mata Bali Mandara ini bisa dilaksanakan. "Untuk itu, Gubernur Bali harus ambil langkah-langkah yang konkrit buat merealisasikan program



Sambungan....

tersebut. Anggaran RS Indra itu sudah disetujui anggarannya dan ditetapkan dalam APBD Induk 2015 dan APBD 2016," ujar Sugawa Korry kepada NusaBali secara terpisah di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin kemarin.

Sugawa Korry pun desak Gubernur Pastika cabut saja Perwali Nomor 14 Tahun 2014 yang dikeluarkan Walikota Denpasar (waktu itu) IB Rai Dharmawijaya Mantra, karena hambat pengembangan RS Mata Bali Mandara. Dia menyebut RS ini melayani operasi buta katarak dan setiap hari selalu dipenuhi antrean pasien, karena ruang operasi terbatas. "Kalau sesuai mekanisme, Perwali itu harus dicabut. Gubernur harus tegas melakukan keputusan itu supaya tidak lama prosesnya," ujar Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.

Di sisi lain, Penjabat Walikota Denpasar AA Gede Geriya mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur. "Kami sudah kirimkan Kabag Hukum untuk rapat dengan Pemprov Bali. Hasilnya, belum tahu apa keputusannya nanti," ujar Gung Geriya saat dihubungi NusaBali, Senin kemarin.

Menurut Gung Geriya, secara kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah berwenang membatalkan dan mencabut Perwali. "Kalau sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, Gubernur bisa membatalkan atau mencabut Perwali tersebut. Riilnya kapan diputuskan, akan kami koordinasikan dengan Pemprov Bali," jelas birokrat asal Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini. nat

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 15



# Perangkat Desa Berjuang ke Jakarta Minta Gaji Setara PNS Golongan IIA

Saat ini perangkat desa di Tabanan dapat gaji antara Rp 1 juta hingga Rp 1.350.000 sesuai jabatannya.

TABANAN, NusaBali

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berjuang untuk menaikkan gaji ke Komisi II DPR RI dan Mendagri, Senin (30/11). Di hadapan Wakil Rakyat dan Mendagri Tjahjo Kumolo, PPDI minta gaji setara PNS golongan IIA yakni sebesar Rp 1.926.000 per bulan. Selain itu mereka minta gaji bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bukan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Sekretaris PPDI Kabupaten Tabanan, Ketut Budiarta mengaku ikut berangkat bersama pengurus lainnya ke Jakarta. Dikatakan, PPDI pertama berkunjung ke Komisi II DPR RI di Senayan pada Senin (30/11) sekira pukul 10.00 Wita. "Kami usulkan penghasilan tetap perangkat desa ditetapkan dalam APBD, bukan dari ADD. Sementara yang ditetapkan dalam APBDes hanya tunjangan," ungkap Budiarta, Senin (7/12).

Budiarta menambahkan, Komisi II DPR RI setuju dengan

usulan gaji perangkat desa setara PNS golongan IIA. Gaji PNS tahun 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 mengenai gaji PNS, mengalami kenaikan 6 persen. Jadi gaji PNS golongan IIA dengan masa kerja 0 bulan sebesar Rp 1.926.000 per bulan.

Setelah *hearing* dengan Komisi II DPR RI, PPDI kemudian menemui Mendagri Tjahjo Kumolo dan diterima sekitar pukul 15.00 Wita. Mendagri berjanji dalam waktu 2 minggu berikan regulasi dan sosialisasikan ke seluruh Indonesia. "Kami masih menunggu waktu dua minggu pasca-pertemuan itu. Sekarang baru berjalan seminggu, mudah-mudahan perjuangan PPDI tercapai," ungkap perangkat desa di kantor Perbekel Delod Peken, Kecamatan Tabanan ini.

Budiarta menambahkan, saat ini perangkat desa di Kabupaten Tabanan dapat gaji bervariasi setiap bulan. Kepala urusan (Kaur) dapat gaji sebesar Rp 1.350.000 per bulan. Sementara kelian dinas dan petugas administrasi masing-masing sebesar Rp 1.250.000. Adapun pembijian dapat gaji sebesar Rp 1 juta per bulan. Gaji sebesar ini

## Posisi Perangkat Desa di Tabanan

Jabatan	Jumlah	Gajiperbulan
Kepala Urusan	665	Rp 1.350.000
Kelian Dinas	814	Rp 1.250.000
Petugas Administrasi	133	Rp 1.250.000
Pembijian	133	Rp 1.000.000

baru dinikmati sejak tahun 2014. Sebelum itu, Kaur dan petugas administrasi dapat Rp 875 ribu per bulan, kelian dinas Rp 850 ribu per bulan, dan pembijian sebesar Rp 500 ribu per bulan.

Kepala Bappeda Tabanan Ida Bagus Wiratmaja dihubungi terpisah mengatakan pada tahun 2016 tak ada kenaikan gaji untuk perangkat desa. Namun dalam APBD tahun 2016, telah dirancah tunjangan jabatan yang besarnya bervariasi. Kaur, petugas administrasi, dan pembijian dapat tunjangan sebesar Rp 400 ribu per bulan. Sedangkan kelian dinas dapat tunjangan Rp 150 ribu per bulan. Adapun perbekel (kepala desa) dapat tunjangan jabatan sebesar Rp 1.825.000 dan Sekdes sebesar Rp 600.000.

"Besaran penghasilan perangkat desa, kades, dan sekdes masih sama seperti tahun 2015, hanya mereka dapat tunjangan jabatan yang nilainya bervariasi," ungkap Wiratmaja. Dengan tambahan itu, Kaur dapat gaji Rp 1.780.000 per bulan, artinya belum menyentuh gaji PNS golongan IIA. **k21**



## Bansos Mulai Cair, namun Tidak Merata

### ★ Komisi I Diperintahkan Turun

Anggota DPRD Bali wayan Disel Astawa (kiri) saat serahkan bansos ke prajuru Desa Adat Ungasan, Senin (7/12).



DENPASAR, NusaBali

Menjelang tutup tahun anggaran 2015, sebagian dana bansos untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali cair. Akibat tidak merata cairnya dana bansos ini, anggota Dewan pun uring-uringan. Masalahnya, hanya 14 persen dari total Rp 46 miliar dana bansos melalui APBD Perubahan 2015 yang cair. Itu sebabnya, Komisi I DPRD Bali diperintahkan turun lagi.

Dari sejumlah dana bansos untuk masyarakat, ada yang cair ada yang tidak sama sekali, ada pula cair penuh, ada lagi yang cair hanya separuh. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama pun perintahkan Komisi I Dewan untuk terjun lagi mendatangi Biro Hukum Setda Provinsi Bali. "Aturan apalagi yang menjadi persoalan? Kami ingin tahu dan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

## Bansos Mulai Cair, namun Tidak Merata

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

minta Komisi I turun ke SKPD," ujar Adi Wiryatama di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (7/12).

Menurut Adi Wiryatama, sisa waktu untuk pencairan dana bansos yang difasilitasi anggota DPRD Bali tinggal tiga pekan lagi. Kalau sampai 30 Desember 2015 tidak bisa dicairkan, berarti tidak merata pencairannya. "Sekarang baru 14 persen yang cair. Kita suruh kejar lagi ke SKPD. Cari persoalan dan alasannya, kenapa nggak dicairkan? SKPD yang menangani dana hibah selalu alasannya aturan teknis. Tapi, aturannya tidak baku, berbeda-beda penafsiran. Kasihan rakyat," sesal politisi senior PDIP asal Tabanan ini.

Adi Wiryatama menyatakan pencairan dana bansos ini tidak ada kaitan masalah Pilkada serentak 9 Desember 2015. "Tidak ada urusannya dengan Pilkada, nggak ada urusan dengan warna. Kita bicara dana rakyat ini. Harus ada penjelasan nanti dan kita minta supaya dicairkan," ujar mantan Bupati Tabanan 2000-2005 dan 2005-2010 ini.

Informasi lain yang dihimpun

NusaBali, Senin kemarin, dana bansos yang difasilitasi anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil badung, Wayan Disel Astawa, justru sudah cair seluruhnya. Bahkan, Disel Astawa telah menyerahkan dana hibah yang difasilitasi itu di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.

Dana hibah yang difasilitasi Disel Astawa senilai total Rp 700 juta, untuk bantu pembangunan Wantilan dan Pura Pengulapan di Desa Pakraman Ungasan. Saat penyerahan dana hibah oleh Disel Astawa yang digelontor dan masuk ke rekening itu, diterima langsung prajuru adat Desa Pakraman Ungasan, Senin siang.

"Dana hibah ini adalah dana masyarakat yang kami fasilitasi sebagai wakil rakyat Badung. Kalau ada yang cair dan ada yang tidak, saya rasa itu tergantung anggota Dewan masing-masing," ujar Disel Astawa saat dikonfirmasi NusaBali, Senin kemarin.

Menurut Disel Astawa, pihaknya menyerahkan dana hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Pihaknya sudah cukup lama mengawal dana hibah tersebut supaya bisa cair. "Karena ini dana ma-

sarakat, harus transparan kita sampaikan kepada rakyat. Tidak ada uang kontan. Yang ada masuk ke rekening. Kalau tidak dicairkan sekarang, bisa hangus karena masa tahun anggaran habis," ujar politisi PDIP asal Desa Ungasan, Kuta Selatan ini.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Badung, IB Pada Kusuma, justru mengatakan seluruh dana bansos yang difasilitasi belum cair. "Saya malah seluruhnya belum cair. Kenapa tidak cair, saya mau pertanyakan ke SKPD. Harusnya dalam waktu mepet ini, dana hibah bisa dicairkan," ujar politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.

Sebaliknya, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, Ketut Kariyasa Adnyana, mengatakan sebagian ada dana hibah yang difasilitasi telah cair. Khusus hibah dari Disdikpora Provinsi Bali, kata Kariyasa, seluruhnya belum cair. "Makanya kami akan turun ke SKPD nanti. Kita mau tahu kok aturannya berubah-ubah? Katanya sudah ada Pergub, lha sekarang informasinya berbeda lagi," ujar politisi PDIP asal Busungiu, Buleleng ini. **nat**

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 1 dan 15



# Rp 3,1 M untuk Software Perekam Transaksi

Perangkat lunak ini akan merekam seluruh transaksi wajib pajak di wilayah Badung. Alat ini konon tidak bisa diotak-atik sebagaimana tapping box.

MANGUPURA, NusaBali  
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Badung menganggarkan Rp 3,1 miliar lebih untuk pengadaan

software web service di 2016. Pengadaan perangkat lunak ini akan melengkapi pemasangan alat tapping box untuk merekam seluruh transaksi wajib pajak (WP).

Fungsi web service sebagai sistem untuk memantau seluruh transaksi wajib pajak. Dengan penggunaan alat ini, wajib pajak disebut-sebut tak bisa lagi mengekali pajak yang mestinya disetor ke kas daerah. Alat pemantau sebetulnya sudah dipasang oleh Dispenda sejak 2013, namanya tapping box. Namun bekalangan alat perekam ini masih bisa diotak-atik. Hal ini diakui oleh pihak Dispenda.

"Kalau ini (web service) adalah software atau program yang

membeberkan, penggunaan web service sudah diujicobakan tahun 2015, tetapi masih dalam jumlah terbatas. "Yang sudah terpasang sebanyak 30 web service, dan sisanya masih dalam proses pemasangan. Sedangkan untuk tahun 2016 ditargetkan terpasang 500 web service, dengan anggaran Rp 3,1 miliar," beber Adi Arnawa.

Sekretaris Dispenda AA Arimayun menambahkan, penggunaan sistem web service memang masih perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Mengingat sistem ini baru pertama kali dilakukan di tingkat nasional.

"Untuk wajib pajak pada prin-

langsung kami tanam pada server wajib pajak. Jadi sangat sulit dimanipulasi, karena langsung mencatat dan melaporkan setiap transaksi secara online ke server kami di kantor Dispenda," kata Kepala Dispenda Badung I Wayan Adi Arnawa, Senin (7/12).

Terkait penggunaan tapping box, Adi Arnawa mengaku sudah cukup efektif. Akan tetapi masih ditemukan sejumlah kelemahan. Misalnya, ada wajib pajak yang menggandakan servernya, sedangkan tapping box hanya mencatat transaksi pada satu server saja. "Karena tapping box berupa alat, jadi mudah mengalami kerusakan," katanya.

Pejabat asal Pecatu, tersebut

sipnya dapat menerima sistem ini, akan tetapi sosialisasi masih sangat diperlukan," kata Arimayun. Dia yakin, pemasangan alat ini akan ada penambahan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Namun demikian, katanya, untuk pelaksanaannya perlu dilakukan lintas koordinasi dengan SKPD lainnya, seperti Satpol PP dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Misalkan, bila wajib pajak tidak mau menerapkan web service pada servernya, bisa saja dilakukan penindakan, atau izin operasionalnya tidak diperpanjang. Untuk memuluskan program ini, kalangan legislatif pun sedang membahas Ranperda Pajak Online. **asa**